

Permasalahan Pendidikan Di Indonesia

Kania Nasha Aulia; Derrysta Ayu Muhtadi; Naia Putri Aditya; Janeeta Naila Santosa; Valeszka Farhahgina Hanggono, Universitas Trisakti.
063002400031@std.trisakti.ac.id

ABSTRACT: Indonesia's education system faces various complex challenges that affect the quality and equity of learning outcomes. Some of the main issues include infrastructure gaps between regions, low teacher competence, lack of parental support, and policy changes that are not yet fully adaptive to student needs. This research aims to explore the root causes of educational problems in Indonesia and provide constructive suggestions based on secondary data. The method used is a literature review from scientific journals and official reports. The results show that improving education quality requires not only curriculum reform but also support from socio-economic aspects and active participation from the community and government.

Keywords: Education, Quality, Access, Policy, Teachers.

ABSTRAK: Pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memengaruhi kualitas dan pemerataan hasil belajar. Beberapa permasalahan utama di antaranya adalah kesenjangan infrastruktur antara wilayah, rendahnya kompetensi guru, kurangnya dukungan orang tua, serta perubahan kebijakan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam permasalahan pendidikan di Indonesia serta menyusun saran solutif berdasarkan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dari berbagai sumber jurnal dan laporan resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dicapai hanya melalui kurikulum, namun juga perlu ditopang oleh faktor sosial, ekonomi, serta peran aktif masyarakat dan pemerintah.

Kata Kunci: Pendidikan, Kualitas, Akses, Kebijakan, Guru

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Namun, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan antarwilayah. Salah satu masalah utama adalah infrastruktur pendidikan yang belum merata, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain itu, kompetensi tenaga pendidik juga menjadi perhatian. Menurut data Kemendikbud, sekitar 60% guru belum memiliki sertifikasi kompetensi mengajar yang sesuai. Hal ini berdampak pada kualitas proses belajar mengajar yang diterima oleh peserta didik. Kurangnya pelatihan profesional berkelanjutan memperparah kondisi ini.

Dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar juga berperan penting dalam keberhasilan pendidikan. Sayangnya, masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya peran mereka dalam mendukung anak-anaknya belajar di rumah.

Kebijakan pendidikan yang sering berubah juga menyebabkan kebingungan di lapangan, baik bagi guru, siswa, maupun lembaga pendidikan itu sendiri. Pergantian kurikulum yang mendadak tanpa pelatihan dan sosialisasi yang memadai menurunkan efektivitas implementasi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah, laporan Kementerian Pendidikan, dan organisasi pendidikan internasional seperti UNESCO dan OECD. Penelitian ini tidak melibatkan data primer, melainkan analisis terhadap data sekunder yang telah tersedia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait

permasalahan pendidikan di Indonesia dan mengaitkannya dengan kebijakan serta program yang relevan.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Ketimpangan Infrastruktur dan Fasilitas di Daerah 3T

Salah satu tantangan paling nyata dalam sistem pendidikan nasional Indonesia adalah ketimpangan infrastruktur dan fasilitas antara daerah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Masih banyak sekolah di wilayah 3T yang menghadapi kondisi fisik bangunan yang rusak, jumlah ruang kelas yang tidak memadai, hingga ketiadaan sarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang komputer. Ini menjadi hambatan besar bagi siswa dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Sebagai contoh, banyak sekolah di wilayah Indonesia Timur seperti di pedalaman Papua, Nusa Tenggara Timur, atau daerah perbatasan di Kalimantan, hanya memiliki satu atau dua ruang kelas untuk puluhan siswa dari berbagai jenjang. Ketiadaan listrik dan akses internet menjadi ironi tersendiri, terlebih di tengah wacana transformasi pendidikan berbasis teknologi. Digitalisasi pendidikan yang menjadi arah kebijakan nasional tidak akan bisa diterapkan secara merata tanpa pemenuhan infrastruktur dasar.

Permasalahan ini juga berdampak langsung terhadap semangat belajar siswa dan kualitas pengajaran guru. Siswa harus belajar dalam kondisi minim kenyamanan, seringkali tanpa pencahayaan yang memadai, dan menggunakan buku-buku usang. Guru pun sulit menerapkan metode pembelajaran interaktif atau praktik sains karena ketiadaan alat peraga atau laboratorium yang layak.

Solusi terhadap masalah ini tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat lokal. Program CSR perusahaan, partisipasi lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta keterlibatan tokoh adat setempat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan.

B. Ketimpangan Kualitas dan Pemerataan Guru

Masalah kedua yang tak kalah penting adalah kualitas guru yang belum merata, baik dari sisi kompetensi maupun distribusinya. Di kota-kota besar, guru umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, akses terhadap pelatihan, dan fasilitas pendukung yang lengkap. Sebaliknya, guru di daerah terpencil kerap menghadapi kondisi sebaliknya.

Masih banyak guru di daerah yang belum memenuhi standar profesionalisme, baik dari segi pedagogi maupun penguasaan materi ajar. Hal ini diperparah oleh kurangnya program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Banyak guru yang tidak mengikuti pelatihan selama bertahun-tahun karena terkendala biaya, jarak, atau minimnya program pelatihan di daerah mereka.

Distribusi guru juga tidak merata. Menurut data Kemendikbudristek, sebagian besar guru terbaik lebih memilih bertugas di kota-kota besar karena alasan fasilitas, tunjangan, dan aksesibilitas. Akibatnya, sekolah-sekolah di wilayah 3T mengalami kekurangan guru tetap, terutama untuk mata pelajaran penting seperti matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Di beberapa daerah, satu guru bisa mengajar dua hingga tiga mata pelajaran sekaligus, atau bahkan merangkap menjadi kepala sekolah.

Pemerintah sebenarnya telah menginisiasi program seperti Guru Garis Depan (GGD) dan program afirmasi untuk calon guru daerah 3T, namun implementasinya masih menghadapi banyak kendala, terutama dari segi insentif yang tidak memadai dan minimnya jaminan karier jangka panjang bagi guru-guru tersebut.

Kebijakan jangka panjang diperlukan untuk membenahi sistem perekrutan dan pelatihan guru, termasuk sistem insentif berbasis lokasi dan tantangan. Selain itu, penguatan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) juga penting untuk memastikan calon guru benar-benar siap mengajar dalam berbagai kondisi geografis dan sosial.

C. Perubahan Kebijakan Pendidikan yang Tidak Konsisten

Konsistensi dalam kebijakan pendidikan menjadi tantangan berikutnya. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan kurikulum: dari Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 (KBK), KTSP 2006, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Perubahan ini, meskipun dimaksudkan untuk memperbaiki mutu pendidikan, sering dilakukan tanpa proses transisi yang memadai dan pelibatan praktisi pendidikan, khususnya guru.

Akibatnya, banyak guru merasa bingung dan terbebani dengan tuntutan administratif serta tidak sempat melakukan adaptasi metode pembelajaran. Perubahan kebijakan sering kali lebih bersifat politis daripada berbasis kajian ilmiah jangka panjang. Hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan strategis dalam sektor pendidikan.

Perubahan kurikulum yang terlalu cepat juga menyebabkan tumpang tindih konten dan kebingungan dalam pengembangan perangkat ajar. Guru dituntut untuk segera menyesuaikan, padahal pelatihan dan modul belum tersedia atau tidak sampai ke semua daerah. Bahkan dalam beberapa kasus, sekolah swasta atau madrasah harus berinovasi sendiri untuk menyiasati kekosongan materi ajar dari pusat. Selain itu, ketidaksinambungan antara kebijakan pusat dan daerah menjadi masalah klasik. Pemerintah daerah kadang menafsirkan atau menanggapi kebijakan pusat secara berbeda, sehingga implementasi kebijakan pendidikan di lapangan menjadi tidak seragam.

Kunci dari persoalan ini adalah perumusan kebijakan yang lebih partisipatif dan berbasis data, serta adanya evaluasi dampak secara berkala. Guru dan kepala sekolah harus dilibatkan sejak awal dalam proses pembuatan kebijakan agar kebijakan yang lahir benar-benar aplikatif dan sesuai dengan realitas di lapangan.

D. Lemahnya Peran Orang Tua dan Masyarakat dalam Pendidikan

Pendidikan bukanlah tanggung jawab sekolah semata. Salah satu tantangan besar yang sering diabaikan adalah minimnya peran serta orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan anak. Di banyak

keluarga prasejahtera, orang tua cenderung menyerahkan sepenuhnya proses pendidikan kepada sekolah. Hal ini tentu tidak ideal.

Banyak orang tua yang tidak memahami bahwa keterlibatan mereka dapat meningkatkan motivasi belajar anak dan membentuk karakter yang lebih baik. Rendahnya literasi pendidikan di kalangan orang tua menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan dukungan moral dan akademik di rumah. Bahkan dalam beberapa kasus, anak-anak terpaksa bekerja membantu ekonomi keluarga, sehingga mengorbankan waktu belajar mereka.

Pendidikan karakter dan kebiasaan belajar yang baik sebenarnya dimulai dari rumah. Namun, realitas sosial dan ekonomi membuat banyak keluarga tidak mampu menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. Anak-anak dari keluarga buruh, petani miskin, atau pekerja informal cenderung mengalami kesenjangan kesempatan belajar dibanding anak-anak dari keluarga menengah ke atas.

Untuk itu, sekolah perlu menjalin hubungan yang lebih erat dengan orang tua dan komunitas lokal. Program seperti “Sekolah Ramah Anak”, parenting education, dan pos pendidikan desa bisa menjadi sarana kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. Pemerintah juga perlu mendorong peningkatan kapasitas orang tua melalui program pemberdayaan keluarga dan literasi pendidikan.

E. Ketidaksiapan Menghadapi Era Digitalisasi

Pandemi COVID-19 menjadi momentum penting yang membuka tabir betapa tidak siapnya sistem pendidikan Indonesia dalam menghadapi transformasi digital. Ketika pembelajaran dialihkan secara daring, jutaan siswa dan guru mengalami kesulitan karena tidak memiliki perangkat, jaringan, atau keterampilan digital yang memadai.

Sekolah-sekolah di perkotaan mungkin mampu beradaptasi cepat dengan Zoom, Google Classroom, atau LMS lainnya. Namun di desa-desa, banyak siswa bahkan tidak memiliki smartphone, atau hanya bisa mengakses internet sekali seminggu dari warnet atau titik Wi-Fi publik. Ini memperbesar kesenjangan pembelajaran antarwilayah, yang dalam

jangka panjang bisa menciptakan generasi dengan kualitas sangat timpang.

Selain masalah infrastruktur, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran digital juga masih sangat terbatas. Banyak guru tidak memiliki keterampilan teknologi informasi yang cukup untuk mendesain pembelajaran daring yang menarik dan efektif. Bahkan, pembelajaran digital yang dilakukan cenderung hanya berupa pemberian tugas melalui WhatsApp atau Google Form, bukan pembelajaran aktif yang mendorong partisipasi siswa.

Pemerintah memang telah melakukan sejumlah intervensi seperti platform Merdeka Mengajar, Rumah Belajar, dan bantuan kuota internet, namun program-program ini belum menjangkau semua kalangan secara merata. Selain itu, masih banyak guru dan siswa yang belum mengetahui atau memanfaatkan platform-platform tersebut.

Digitalisasi pendidikan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan paradigma pembelajaran. Untuk itu, perlu investasi jangka panjang dalam penguatan infrastruktur TIK, pelatihan guru, serta pengembangan konten pembelajaran digital yang kontekstual dan inklusif. Sekolah juga harus mulai membangun budaya digital secara perlahan, dimulai dari literasi digital dasar dan etika bermedia.

IV. KESIMPULAN

Lima masalah utama yang dibahas di atas menunjukkan bahwa tantangan pendidikan di Indonesia sangat kompleks dan saling berkaitan. Ketimpangan infrastruktur memperlemah proses belajar; distribusi guru yang tidak merata memperburuk kualitas pembelajaran; kebijakan yang tidak konsisten menyulitkan adaptasi; keterlibatan orang tua yang rendah mengurangi keberhasilan pendidikan anak; dan ketidaksiapan digital memperdalam kesenjangan antarwilayah.

Pendidikan yang berkualitas tidak akan tercapai tanpa sinergi seluruh elemen bangsa. Pemerintah perlu memperkuat tata kelola pendidikan berbasis data dan partisipasi, masyarakat perlu didorong untuk menjadi bagian dari gerakan pendidikan, dan sekolah harus diberdayakan untuk menjadi pusat transformasi sosial di wilayahnya masing-masing.

Penguatan kapasitas guru, pemerataan fasilitas, pelibatan keluarga, serta keberlanjutan kebijakan dan digitalisasi yang inklusif menjadi pilar-pilar penting dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif, berkeadilan, dan mampu mencetak generasi unggul Indonesia di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Wahyudi, L. E., dkk. (2022). Mengukur Kualitas Pendidikan di Indonesia. MJEMIAS.
- Kemendikbudristek. (2023). Statistik Pendidikan Nasional.
- UNESCO. (2022). Global Education Monitoring Report.
- Suherman, A. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka. Bandung: Indonesia Emas Group.
- OECD. (2018). Programme for International Student Assessment (PISA) Results.
- Ramdani, N. G., dkk. (2023). Teori dan Strategi Pembelajaran. Yogyakarta: Alma Ata Press.